

# PERSPEKTIF BUDAYA DAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN RAKYAT

**Fuad Madarisa**

**Abstract.** *Cultural and institutional perspectives play an important role in establishing agribusiness characters within techno-parks' regional development model. First, they reflect values, norms and institutional configuration to support regional development. Second, their level of advances ensured the 'trust, correctness, and capabilities' of cultural and institutional establishment as genuine tools of market and regional economics development. The paper offers several critical examples of cultural and institutional foundations in searching for their current positions. It includes the role of each stakeholder involving in the region and its style within the period of time. Then, it also shows tactics of improving institutional performance as well as the indicators of monitoring institutional development.*

**Kata Kunci:** perspektif budaya dan institusi, kawasan agribisnis, peran pihak terkait, dan kinerja lembaga

## PENDAHULUAN

Transformasi (perubahan total dari aspek sosial) menuju agribisnis muncul dari penerapan gagasan cerdas. Intinya berupa teknologi dan cara-cara mendorong produktifitas serta efisiensi pemakaian sumberdaya bersamaan dengan prosesnya. Masyarakat tani ternak karena itu, meniru, menerima, mengelola, dan melembagakannya kedalam bu(di)daya. Jadi, pembaharu perlu mencermati budaya dan institusi yang mendorong atau sebaliknya jadi kendala pengembangan agribisnis. Maka transformasi masyarakat mulai dari peasant menjadi usaha berwatak agribisnis, dengan mementingkan adanya peran moral yang (mestinya) merujuk aspek transendental.

Perhatian pada budaya petani peternak berupa keseluruhan cara dan seluk beluk kehidupan mereka sering kali dipandang usang. Bila terjadi kebuntuan alih-alih mandiri dalam menyelesaikannya para pengambil kebijakan di negara berkembang minta pertimbangan dan

bantuan dari negara maju. Maka, perspektif budaya dan institusi amat perlu untuk memahami pemaknaan realitas yang kesannya meremehkan itu. Sebab banyak negara berkembang, seperti Indonesia, telah lama memaklumkan 'merdeka'.

Apalagi belakangan ini muncul dinamika kebijakan pertanian dan pangan yang melibatkan tiga karakter pelaku yang saling berbeda; yaitu (pemerintah, swasta dan masyarakat). Simak misalnya UU 16/2006. Padahal masyarakat tani ternak membutuhkan peran sinkron dan saling menghantar satu sama lainnya. Sebuah sinergi dinamis saling menguntungkan dan berujung pada keadilan dan kesejahteraan.

Malahan, Vorley (2002) telah mengidentifikasi kebijakan yang justru cenderung menuju kearah pelemahan, seperti:

a. Menyusutnya peran yang diikuti dengan berkurangnya harapan pada adanya intervensi negara;

- b. Persetujuan perdagangan multilateral, termasuk terhadap komoditi pertanian yang membuka ruang persaingan lebih luas dan ketat;
- c. Desentralisasi dan otonomi lingkup pengambilan kebijakan negara;
- d. Bangkitnya pemikiran dualisme yang bertentangan dan berkurangnya harapan kepada pertanian sebagai pendorong pembangunan pedesaan;
- e. Pasar bebas yang menurunkan bea masuk pada komoditi luar negeri dan membuat harga lebih kompetitif;
- f. Pemberian ranah penelitian dan penyuluhan pada pihak swasta dan masyarakat;
- g. Masifnya teknologi baru yang kian kompleks, rumit dan celakanya kebijakan seputar (bio)teknologi cenderung membingungkan;
- h. Bangkitnya organisasi sosial ekonomi baru yang mendorong kompetisi lebih ketat.

Karena itu, kemajuan agribisnis yang cenderung lebih memakai pendekatan pasar dan berkarakter industri, kiranya tidak serta merta meremehkan solidaritas sosial. Lagi pula transformasi, seperti globalisasi, standarisasi dan nilai tambah usaha, yang tengah memerangkap kehidupan petani peternak, membutuhkan solusi kritis dan kreatif. Bila tidak campin menyikapinya, mereka yang memang bertempur diarena pasar bebas, bakal keteteran dan tergelepar.

Tulisan berikut ini merupakan penyarian dari buku penulis yang judulnya perspektif sosiologi pembangunan agribisnis (Fakultas Peternakan Unand tahun 2010). Isinya bisa menyumbang bagi pemahaman tentang budaya dan institusi buat pengembangan kawasan peternakan rakyat berwatak agribisnis. Lalu, menginformasikan sesuatu agar kita bisa melakukan proses antisipatif. Bagian (1) kawasan pengembangan peternakan rakyat, (2) perspektif agribisnis, (3) budaya dan

institusi penunjang pengembangan kawasan peternakan rakyat.

### **KAWASAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN RAKYAT**

Bappenas (2004) telah mengeluarkan tatacara pengembangan kawasan dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Tentu, sesudah penerapan kebijakan desentralisasi pemerintahan di daerah. Pengertian kawasan peternakan rakyat adalah; suatu kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan usaha peternakan. Dalam pengembangannya melibatkan partisipasi rakyat. Bentuk-bentuknya ialah penumbuhan investasi, proses pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan mereka. Ia dipandang lebih sebagai pendekatan agribisnis ketimbang kawasan peternakan biasa. Sebab kawasan ini membawa semua aspek *on-farm dan off-farm* ke dalam pertimbangan kegiatannya. Ciri-ciri kawasan peternakan rakyat meliputi hal berikut, seperti:

- a. Lokasi sesuai dengan agroekosistem dan alokasi tata ruang daerah;
- b. Peran masyarakat sekitar kawasan amat menentukan sebagai pelaku bisnis;
- c. Ternak unggul merupakan basis atau dasar pengembangan yang strategis;
- d. Adanya upaya pengembangan kelompok peternak menjadi pelaku bisnis;
- e. Bagian terbesar komponen pendapatan masyarakat berasal dari agribisnis peternakan;
- f. Mempunyai prospek pasar yang jelas dengan dukungan teknologi memadai;
- g. Memiliki prospek dan peluang pengembangan dan diversifikasi usaha yang tinggi;
- h. Mendapat dukungan institusi dan jejaring kerja kelembagaan dari hulu sampai hilir.

Secara teknis kawasan peternakan ini memadai dari sisi penyediaan air,

sarana pengangkutan, komunikasi, jarak dengan pasar, iklim, dan keamanan dari pemukiman penduduk. Kawasan ini memiliki sarana dan prasarana seperti; industri bibit, pakan, perlengkapan obat dan vaksin, peralatan dan mesin mesin. Lagi pula ia punya fasilitas pasca panen seperti rumah potong hewan dan pengolahan hasil lainnya. Kemudian secara administrasi juga mendukung.

Institusi peternak memainkan peran penting, sehingga kelompok peternak dan asosiasi bisa bekerjasama dengan pihak terkait. Kerjasama ini meliputi tim teknis khusus yang mendiskusikan berbagai persoalan kawasan. Ia melibatkan pula kerjasama sinergis dengan lembaga keuangan, pihak swasta terkait, dan BUMN serta koperasi. Pada gilirannya kelompok peternak menjelma menjadi KUBA sebagai ajang inovasi kerjasama institusi. Dengan demikian agribisnis merupakan esensi pembangunan kawasan peternakan rakyat. Apa itu budaya dan institusi dalam perspektif pembangunan agribisnis?

### **PERSPEKTIF AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN**

Agribisnis di Indonesia telah menjadi kebijakan sejak satu dekade terakhir. Di Sumbar, agribisnis terbalut dalam kebijakan 'mendorong terbinanya *techno-park* berbasis pertanian, sebagai perwujudan aktivitas ekonomi yang bersandar pada ilmu pengetahuan'. Simak misalnya, misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025, pada Perda No 7/2008, yang berbunyi "meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dan berdaya saing tinggi". Sampai akhir priode kedua RPJM tahun 2015, telah terbina 36 kawasan agribisnis. Lantas seperti apa kategori dan komponen transformasi menuju agribisnis itu? Perhatikan Tabel 1.

Menerapkan misi ini jelas merujuk pada kegiatan ekonomi potensial dan telah menunjukkan produktifitas kerjanya yang baik. Ukuran menentukan potensi atau kinerja baik, di antaranya adalah; pengalaman (budaya mengelola) dan kehadiran fasilitas pendukung serta sinerginya dengan peran (institusi) para pihak terkait didaerah. Jadi, sesuai dengan pendapat Davis (2004), perspektif budaya dan institusi berupa analisa sosial, partisipasi, dan berpihak pada kelompok rentan dan pinggiran, sangat penting dalam semua pembangunan (termasuk agribisnis). Bagaimana budaya dan institusi yang relevan dengan pengembangan kawasan agribisnis peternakan rakyat itu?

### **BUDAYA DAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN RAKYAT**

Giddens (1991) mengungkapkan bahwa budaya ialah keseluruhan dari cara kehidupan penduduk, termasuk pola berfikir dan berperilaku, dan menghasilkan lingkungan sosial yang terbina oleh interaksi manusia. (Ingat ada pula lingkungan alam) sebagai ciptaan Tuhan. "*Budaya terdiri dari nilai nilai dari anggota suatu kelompok yang mereka anut, norma yang mereka ikuti, dan barang materil yang mereka ciptakan. Nilai nilai adalah keharusan abstrak, sementara norma ialah prinsip prinsip jelas atau aturan yang diharapkan terlaksana dan dapat dicermati. Norma mewakili 'keharusan' dan 'tidak boleh' dalam kehidupan sosial masyarakat*" (hal. 31).

**Institusi** ialah mekanisme atau cara masyarakat memenuhi kebutuhannya – yang berlangsung lama dan telah menyatu dengan struktur sosial. Contoh institusi sosial adalah badan pemerintahan, sistem sekolah dan sistem sosial keagamaan. Institusi melibatkan norma dan nilai dimana sebagian besar



Tabel 1. Kategori dan Komponen Transformasi Agribisnis

No	Kategori	Tipe Komponen	
		Lama /Peasant	Maju/Agribisnis
1	2	3	4
1	Sistem	Subsisten + dekat dengan keperluan sendiri	Komersil
		Banyak jenis hasilnya	Hasilnya tunggal
		Bebas tidak dijaga	Terlindungi
		Menghindari resiko /apatis	Mengambil resiko
		Tradisionil	Agresif
		Masukan dan keluaran rendah	Masukan dan keluaran tinggi
2	Lahan	Berbasis pada hak guna usaha	Hak milik atau sewa
		Tidak disurvei	Disurvei
		Pemilikan lahan oleh suku atau negara	Pemilikan lahan yang aman
		Sisa atau tidak subur	Subur
		Secara struktur kerap kekurangan	Tersedia khusus buat perusahaan
3	Tenaga kerja	Intensif	Ekstensif
		Tidak memakai mesin	Pemakaian mesin tinggi
		Kemampuan diperoleh informal	Melalui pelatihan formal
		Berasal dari keluarga sendiri	Tidak dari keluarga saja
4	Bibit tanaman dan ternak	Jenis bibit dari ladang sendiri	Varitas yang hasil dan responnya tinggi
		Campuran	Hibrida
		Disiapkan sendiri	Beli tiap tahun/ketika perlu
		Tidak ada perlakuan khusus	Ada penutup bibit
5	Air	Tergantung musim, tidak aman	Aman, beririgasi dan berpotensi tinggi
6	Kredit	Tidak ada, kecuali informal	Tersedia beragam jenis kredit
7	Layanan penyuluhan	Jarang, hanya dari pemerintah	Penyuluhan pribadi dan pemerintah
8	Pasar	Kelebihan produksi dijual ke pasar lokal/daerah sendiri	Hasil memang untuk dijual semuanya
		Penjualan setelah panen	Strategi pemasaran terkendali
		Tidak ada nilai tambah	Adanya pengendalian kualitas

Sumber : Diolah dari Annexes 11 dan Osorio (2007).

anggota mematuhi. Sanksi yang berat melindungi semua mode pelem-bagaan perilaku anggota. Dengan begitu, budaya dan institusi ibarat dua muka mata uang logam saling terkait satu sama lain dalam lingkup norma, nilai, aturan, perilaku untuk menghasilkan barang dan jasa pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Budaya utama yang terkait dengan agribisnis adalah terbinanya watak dan karakter industri dalam aktivitas penyelenggaraan peternakan. Baik dalam konteks *on-farm* atau *off-farm*, seperti bibit, pakan, pemeliharaan, pencegahan penyakit dan pemasaran. Kemudian, institusi atau kelembagaan, permodalan, informasi, teknologi dan sumberdaya manusia. Sedikitnya ada budaya jujur, dipercaya dan disiplin yang mesti ada. Simak dua contoh berikut:

a. Agama, pasar dan masyarakat madani, dari Stackhouse dan Lawrence Stratton (2002), disebutkan bahwa sistem pasar terbuka, adil dan sukses tidaklah disandarkan pada ego, korupsi, kibul dan kebohongan. Ia tidak juga bakal berhasil tanpa struktur moral dan keterbukaan sosial. Sistem pasar hanya bisa terbuka dan adil manakala ada sistem kelembagaan yang berkelanjutan dan ditunjang dengan kejujuran sosial.

Ketika institusi berkarakter semacam ini terwujud, maka suatu sistem pasar bebas tidak hanya bisa mekar, ia malah menyumbang secara optimal buat pembangunan lebih lanjut. Tentu dengan watak adanya pemerataan akses pada informasi, pemerintahan yang baik, hak azasi manusia, dan kepedulian sosial. Kemudian ia membentuk dan seterusnya mempertahankan institusi yang bermanfaat dalam memberikan kualitas pelayanan barang dan jasa dengan harga yang fair. Malahan ia bisa menguat-

kan kekeluargaan, kreatifitas budaya dan institusi agama.

Secara bersamaan semua faktor ini menyumbang bagi apa yang disebut dengan 'modal sosial' atau modal budaya dalam teori sosial dan politik. Dengan kata lain, mereka menghasilkan modal ekonomi yang berproses dan bekerja buat kebaikan semua. Perbedaan menyolok antara masyarakat miskin dan dinamis ialah, ketika sumber kesejahteraan baru tumbuh dan ranah pengembangan kapasitas manusia berada ditengahnya. Sehingga bisa dimengerti bahwa aspek moral mesti masuk dalam perhitungan.

Agar mengerti bagaimana pasar bekerja ditengah masyarakat madani, perlu menyajikan perspektif sejarah kehidupan ekonomi. Maka, perlakuan pada wacana ini mesti memasukkan 'agama' sebagai hal yang amat berpengaruh kepada moral, masyarakat dan budaya. Sebab ia membatasi atau membuka konteks sosial pasar yang mempengaruhi kenyataan kesejahteraan atau kemiskinan. Memang ada ranah tidak nyaman, ketika realitanya agama membatasi dorongan pada mekarnya pasar. Apalagi tidak semua orang suka dicermati sesuai agama dan kepercayaannya. Tapi tidaklah jujur, ketika meremehkan etika agama bersilang arah dalam membentuk orientasi ekonomi;

b. Hikmah sejarah gempa bumi. Selain alasan ilmiah, sejumlah ayat mengisahkan guncangan bumi dan reruntuhan bangunan terjadi lantaran gempa. Namun penyebabnya bukan benturan dan pergesekan patahan bumi saja. Dalihnya justru lebih mengacu kepada tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan mendustakan agama. Simak, misalnya umat nabi Syuaib di Madyan.

*“Kepada penduduk Madyan, kami utus saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Ia. Telah datang kepadamu bukti yang nyata daripadaNya. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu kurangkan barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan kamu membuat kerusakan di permukaan bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Itu lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.” (Q 7:85). ...Lalu gempa bumi menimpa mereka. Dan pagi hari mereka mati bergelimpangan dalam negerinya, mencium tanah (Q 7:91).*

Apakah salah satu penyebab gempa, karena itu, adalah perilaku ‘tidak menyempurnakan takaran dan timbangan’? Kalau betul pelajaran sejarah bahwa gempa terkait dengan transaksi jual beli, maka apa kebijakan guna mengantisipasi terjadinya gempa bumi? Bukankah perlu melakukan tera timbangan dan ‘reward and punishment’ dalam memastikan jituannya ukuran takaran dan timbangan? Transaksi dan perilaku agribisnis, dengan begitu, mesti memiliki landasan kejujuran, seperti saat menakar dan menimbang bukan ?.

*Institusi* yang berhubungan dengan pengembangan kawasan peternakan meliputi tiga karakter. Hal serupa terjadi pada penyuluhan agribisnis. UU 16/2006 mengukuhkan tiga institusi yang berbeda sifat sebagai pelaku, dalam kawasan, yaitu; pemerintah (yang sudah otonom), kelompok peternak dan pihak swasta. Kendati ketiganya mempunyai perilaku yang berlainan satu sama lain, yang kita perlu ialah sinergi mereka. Simak Tabel 2.

Ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri dalam upaya mengembangkan kawasan peternakan. Tetapi, kita tidak bisa meremehkan satu lembaga, sebab ketiganya mesti bekerja secara sistematis dan sinkron untuk kepentingan kawasan secara utuh dan menyeluruh.

Selain itu, ketiga karakter institusi bersinergi dalam peran-peran yang mereka mainkan. Bersama perjalanan waktu, peran pemerintah cenderung turun, walaupun tidak bakal habis. Sebaliknya peran swasta dan masyarakat kian meningkat. Simak Model 1.

Pengembangan kawasan peternakan mulai dengan Tahap 1, belajar secara efektif. Disini peran pemerintah masih besar mendorong dinamika kawasan.

Pemerintah membentuk tim sinergi yang melibatkan semua pihak terkait. Ukurannya adalah kompetensi dalam arti luas untuk mewujudkan kawasan dinamis dan mendapat komitmen pimpinan yang kuat.

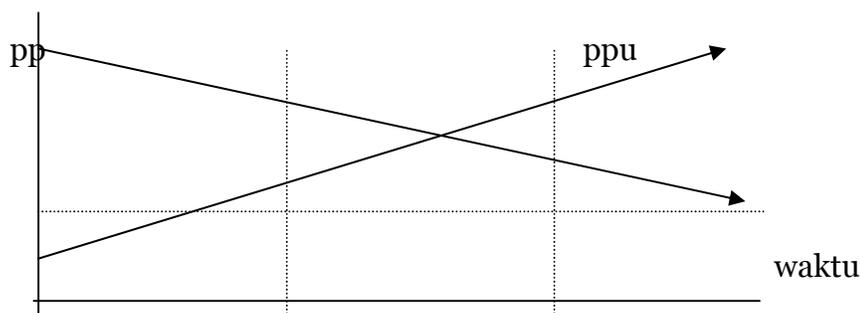
Tahap kedua, belajar efisien adalah melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya dimana peran peternak dan swasta semakin membesar. Sebaliknya peran pemerintah mulai berkurang. Hal ini mungkin terjadi lantaran pada tahap pertama para pihak terkait telah meraih pengalaman menerapkan pengembangan kawasan.

Tahap terakhir, perluasan kawasan pengembangan, dimana peran pemerintah berada pada tingkat pelayanan minimal. Sedang peternak dan swasta tinggi perannya. Maka, untuk mencermati posisi institusi peternak dalam perannya terhadap pengembangan kawasan agribisnis peternakan, perhatikan Tabel 3. Sedangkan strategi memperbaiki kinerja institusi, perhatikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Sifat dan potensi sinergi institusi terkait pengembangan kawasan peternakan

No	Unsur sifat	Pemerintah	Swasta	Kelompok masyarakat
1	Prinsip/me kanisme kerja	Organisasi, birokrasi	Proses pasar	Asosiasi, kesadaran
2	Pengambil keputusan	Ahli, administrator	Individu, produsen, konsumen, investor dan penyimpan	Pimpinan dan anggota
3	Tuntunan perilaku	Peraturan-peraturan	Sinyal harga, kualitas layanan dan penyesuaian	Persetujuan
4	Kriteria keputusan	Kebijakan dan alat penerapannya	Efisiensi maksimal, keuntungan & kegunaan	Kepentingan anggota
5	Sanksi	Kekuasaan negara, paksaan	Kehilangan uang	Tekanan sosial
6	Model kerja	Atas- bawah	Perorangan	Bawah – atas

Sumber : Helmi et.al (2000).



1. Belajar efektif      2. Belajar efisien      3. Perluasan  
 PP = peran pemerintah    PPU = peran swasta dan masyarakat

**Model 1. Perubahan Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat**

Menurut Rowe dan Neville Commins (2008) ada asumsi dan keadaan untuk mendorong dinamika kawasan agribisnis berbasis usaha peternakan kecil dengan kasus bioteknologi, sebagai berikut:

1. Ekonomi telah berkembang secara luas, beragam dan sistemik serta berkelanjutan;
2. Adanya dasar dasar penelitian aplikasi yang kuat;
3. Budaya kewirausahaan yang mantap;

4. Pelaku dan pihak terkait yang aktif, termasuk lembaga penelitian perguruan tinggi sebagai penarik pengembangan kawasan;
5. Pengelolaan yang berwatak proaktif dan kewirausahaan;
6. Dukungan kuat, konsisten dari kebijakan terhadap pengadaan infrastruktur, pengembangan usaha, dana untuk pengadaan tampang dan modal ventura.

Tabel 3. Kriteria menilai perkembangan kelompok peternak dalam kawasan

No	Kriteria	Indikator/ tolok ukur
1	Terdapat kelompok yang kuat dan tangguh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. karakter / sifat kelompok jelas bagi semua anggota</li> <li>2. peran dan tanggungjawab terbagi secara merata / adil</li> <li>3. aturan dan regulasi berjalan baik</li> <li>4. anggota mau mengikuti aturan baru</li> <li>5. tersedia cukup personil sebagai calon anggota inti</li> <li>6. anggota inti mengerti peran dan fungsi mereka</li> <li>7. pimpinan dipilih dalam rapat dan pertemuan</li> </ol>
2	Anggota saling bertemu dan berkomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelompok menyelenggarakan pertemuan terjadwal</li> <li>2. semua anggota mengikuti pertemuan</li> <li>3. semua anggota berperan dalam diskusi</li> <li>4. keputusan selalu di patuhi</li> <li>5. tersedia hasil pertemuan secara tertulis</li> <li>6. selalu membuat publikasi tentang kegiatan dan kemajuan kelompok</li> </ol>
3	Pengelolaan keuangan baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. neraca dipelihara atas dasar kebiasaan kelompok</li> <li>2. bendahara memberikan laporan rutin</li> <li>3. catatan pembukuan sangat dapat dipercaya</li> <li>4. sistem audit berjalan atau berfungsi</li> </ol>
4	Kegiatan kelompok berjalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan mampu menyahuti kebutuhan dan menyelesaikan masalah anggota</li> <li>2. kegiatan bisa berjalan memakai sumberdaya sendiri</li> <li>3. kelompok memutuskan kegiatan yang bakal dikerjakan</li> </ol>
5	Pemecahan masalah berjalan efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. semua konflik priode terakhir tersalurkan</li> <li>2. ada kesepakatan prosedur pemecahan konflik</li> </ol>
6	Kaitan pada pihak luar terbangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. keterkaitan secara horizontal (sesama kelompok) telah terbangun</li> <li>2. kelompok memperoleh manfaat dari hubungan sesama kelompok sejenis</li> <li>3. kaitan vertikal (pemerintah &amp; swasta) terbangun</li> <li>4. kelompok menerima manfaat dari hubungan vertikal</li> </ol>
7	Mobilisasi sumber daya efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. asset kelompok meningkat</li> <li>2. kelompok menerima masukan dan rezeki baru</li> <li>3. kelompok menggalang dana</li> <li>4. kelompok menggunakan dana untuk menambah asset</li> </ol>

Sumber: Tidarat (1998).

Semua kondisi lapangan ini diukur dengan kriteria kinerja sebagai berikut:

a. Adanya akses kepada lembaga penelitian yang mapan dan proses pengem-

bangun sumberdaya manusia sesuai kebutuhan;

b. Adanya pasar dan kemampuan memasarkan produk dan layanan berkualitas tinggi;

- c. Adanya kemampuan pemasaran dan pengelolaan bagi usaha (kecil dan menengah) yang langka kapasitasnya dalam hal seperti itu;
- d. Berada ditengah masyarakat yang jujur, melindungi produk dan rahasia proses, melalui keamanan, hak paten dan cara cara lainnya;
- e. Mampu memilih atau menolak jenis usaha mana yang bisa memasuki kawasan. Rencana usaha disesuaikan dengan identitas kawasan;
- f. Mempunyai identitas yang jelas, yang kerap dinyatakan dengan logo, lambang/symbol atau pola manajemen;
- g. Pengelolaan yang sehat dari sisi keuangan dan memperlihatkan rencana pengembangan jangka panjang;
- h. Didukung oleh pelaku ekonomi yang kuat, dinamis dan stabil; dari lembaga keuangan, politik atau universitas;
- i. Pengelola yang aktif dan punya visi; mampu membuat keputusan jitu dan terarah; terapresiasi secara akademik, pelaku usaha dan mewakili kawasan sebagai 'watak kawasan itu sendiri';
- j. Kawasan mendapat sokongan dari lembaga konsultan, pelayan teknis dan labor serta institusi penjaga kualitas hasil dan proses.

Tabel 4. Taktik perbaikan kinerja institusi dan kelompok

No	Kriteria	Proses
1	Keputusan	Arah baru dikeluarkan oleh pimpinan dan dilewatkan melalui hirarki kelompok dengan cara satu arah
2	Penggantian	Satu atau lebih personil – biasanya pada posisi tinggi – diganti dengan orang yang berbeda pandangan, afiliasi, kemampuan dan sikapnya
3	Restrukturisasi	Struktur program dimodifikasi bersamaan dengan perubahan kewenangan dan pelaporan, interaksi staf lapangan, kaitan dengan pelanggan dst
4	Keputusan kelompok	Anggota kelompok berpartisipasi memilih dan melaksanakan pilihan perubahan yang disarankan pihak lain baik dari pihak luar atau pimpinan
5	Pengumpulan data & diskusi	Pihak luar mengumpulkan informasi tentang program dan memberikan umpan balik kepada staf. Staf menganalisa informasi, diagnosa masalah, dan mengembangkan solusi
6	Pemecahan masalah kelompok	Satu kelompok terkait program mengumpulkan informasi, identifikasi dan analisa isu dan masalah serta merancang dan menerapkan pemecahannya
7	Kelompok T	Fasilitator membantu kelompok memahami proses perilaku individu dan kelompok untuk mengembangkan hubungan interpersonal
8	Ujicoba	Ujicoba dipakai menentukan, pilihan mana yang berjalan baik bagi kinerja kegiatan. Belajar dari pengalaman ujicoba dimasukan dalam perubahan berikutnya
9	Pelatihan	Program bagi peserta untuk mendapat tambahan keterampilan, kemampuan, konsep dan perilaku baru

Sumber: Brinkerhoff (1990).

## PENUTUP

Budaya dan institusi memainkan peran penting untuk mendorong dinamika kawasan agribisnis peternakan rakyat. Setidaknya kejujuran, kepercayaan dan disiplin. Ia melibatkan tiga karakter lembaga yang berbeda; pemerintah, swasta dan masyarakat peternak. Peran pemerintah cenderung menurun bersamaan perjalanan waktu. Dilain pihak peran kelompok masyarakat dan swasta semakin besar.

Ada tujuh kriteria guna menilai tingkat perkembangan kelompok, yaitu; adanya kelompok yang kuat, komunikasi yang baik, keuangan terbuka, kegiatan yang berjalan, penyelesaian masalah efektif, ada kerjasama dengan pihak luar, dan efektifnya mobilisasi sumberdaya.

Ada sembilan kiat untuk memperbaiki kapasitas institusi penunjang kawasan agribisnis peternakan rakyat, seperti; keputusan, penggantian, keputusan bersama, restrukturisasi, diskusi dan pengumpulan data, penyelesaian masalah kelompok, hubungan personal, uji coba dan pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Sumbar 2009. *Grand Design the International Training Centre and Livestock Development.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas, 2004. *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk Percepatan Pembangunan Daerah.* Dirkem Khusus-Tertinggal Bappenas. Jakarta.
- Brinkerhoff, D.W. (1990). *Improving Development Program Performance. Guidelines for Managers.* Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Davis, Gloria. 2004. "A History of the Social Development Network in The World Bank, 1973–2002." *Paper No. 56/March 2004.* The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Fax: 202-522-3247
- Giddens, Anthony. 1991. *Sociology.* Cambridge: Polity Press.
- Helmi, Fuad Madarisa, Nuwirman dan S Fairuzi, 2000. "Pola Pengembangan Komoditi Usaha Ekonomi Rakyat Sumatera Barat." Bappeda Sumbar dan PPs Universitas Andalas Padang
- Jassin, H.B, 1982. *Terjemahan Al Quran Bacaan Mulia.* Jakarta: Yayasan 23 Jan 1942.
- Madarisa, Fuad. 2008. "Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; Strategi dan Proses Belajar Bersama Kelompok." Fak. Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Madarisa, Fuad. 2010. "Perspektif Sosiologi Pembangunan Agribisnis." Fak. Peternakan Universitas Andalas. Padang.
- Osorio, Jose Diaz. 2007. "Family Farm Agriculture Factors Limiting its Competitivity and Policy Suggestions." *Report prepared for the OECD review of agricultural policy in Chile.* Department of Agricultural Economics University of Talca Chile June, 22nd 2007.
- Rowe, David dan Neville Commins. 2008. "Success Factors for Science Parks in the Developed World and Emerging Economies." *The proceedings of the IASP Conference, 2008, Johannes-burg, South Africa.*
- Stackhouse, Max dan Lawrence M. Stratton, 2002. *Capitalism, Civil Society, Religion, and the Poor: A Bibliographical Essay.* Delaware: Intercollegiate Institute Wilmington.
- Tiyajamorn, Tidarat, 1998. "How Farmers can Help Strengthen Government Extension Services: Experience in Thailand." *Paper presented at Ateneo Manila Alumni Conference, Manila.*
- Vorley, Bill. 2002. "Sustaining Agriculture: Policy, Governance, and the Future of Family-based Farming." *A Synthesis Report of the collaborative research project 'policies that work for sustainable agriculture and regenerating rural livelihoods.* London WC1H 0DD, UK: IIED — [bookshop@iied.org](mailto:bookshop@iied.org)

